

Andalas Journal of International Studies



Ali Maksum

Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi

Imelda J Sianipar

Populisme Dan Kebijakan Luar Negeri Di Indonesia

Agung Setiyo Wibowo

Peran Mission for Migrant Workers (MFMW) dalam Advokasi
Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hong Kong

Yusnarida Eka Nizmi

Mengurai Fenomena Perdagangan Perempuan di Negara-negara Teluk
dan Timur Dekat

Silsila Asri

Kontraversi Foreign Direct Investment dan Solusinya Bagi Negara

Lailatul Fitriyah

Poststructuralist-Feminist International Relations: A Point of
Reconciliation?

Andalas Journal of International Studies	Volume 4	No 1	Halaman 1-108	Padang May 2015	ISSN 2301-8208
--	----------	------	------------------	--------------------	-------------------



**Andalas Institute of International Studies
International Relations Department
Faculty of Social and Political Science
Andalas University**

Andalas Journal of International Studies

ISSN :2301 - 8208

Published by
Andalas Institute of International Studies – ASSIST
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Andalas
Padang

Editor in Chief : Haiyyu Darman Moenir
Editorial Board : Ranny Emilia, Apriwan
Associate Editors : Virtuous Setyaka, Putiviola Elia Nasir, Sofia Trisni
Design/lay out : Trio Sirmareza/Ardila Putri
Editorial Advisory Board : Assoc. Prof. Denise M. Horn (Northeastern University)
Dr. Sukawarsini Djelantik (Universitas Khatolik Parahyangan)
Philip Vermonte (CSIS Jakarta)
Edwin Tambunan (Universitas Pelita Harapan)
Widya Setiabudi (Universitas Padjajaran)
Editorial Office : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus LimauManis Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266,
Homepage :<http://ajis.fisip.unand.ac.id/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST, contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes for papers which never been published. Submit your paper to our editorial office in conditional, type in A4, consist of 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Andalas Journal of International Studies

Volume 3, No. 1, May 2014

ISSN 2301-8208

Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi	1
Ali Maksum	
Populisme Dan Kebijakan Luar Negeri Di Indonesia.....	27
Imelda J. Sianipar	
Peran Mission for Migrant Workers (MFMW) dalam Advokasi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hong Kong	48
Agung Setiyo Wibowo	
Mengurai Fenomena Perdagangan Perempuan di Negara-negara Teluk dan Timur Dekat	64
Yusnarida Eka Nizmi	
Kontraversi <i>Foreign Direct Investment</i> dan Solusinya Bagi Negara.....	80
Silsila Asri	
Poststructuralist-Feminist International Relations: A Point of Reconciliation?	96
Lailatul Fitriyah	

POPULISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI INDONESIA

Imelda Masni Juniaty Sianipar

Abstract

On October 20, 2014, Joko Widodo or familiarly known as Jokowi was sworn in as the Seventh President of the Republic of Indonesia. The majority of Indonesian society supports Jokowi because He is simple, honest and populist. The presence of populist leaders in international politics often attracts the attention of Western countries, particularly the United States. Populist leaders are often considered as the authoritarian leaders, anti-democratic, anti-Western, anti-foreign and anti-market. Hugo Chavez from Venezuela and Mahmoud Ahmadinejad from Iran are the examples. Chavez and Ahmadinejad are considered as threats by the United States because they challenge the United States led regional and global order. This article will examine the direction of Jokowi's foreign policy. This article argues that Jokowi is a moderate populist leader. Jokowi is friendly to other countries including the West but still prioritize the national interests. Thus, Indonesia under Jokowi is not a threat to other countries and the West. In fact, they can work together to achieve their common national interests.

Keywords: *populism, foreign policy, Indonesia, jokowi, moderate populism*

Pendahuluan

Pada 20 Oktober 2014 lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014, dari total suara 133.574.277, Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 70.997.833 atau sebesar 53,15 % sementara pesaingnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 62.576.444 suara atau sebesar 46,85 %.¹ Mayoritas rakyat Indonesia memilih Jokowi karena Jokowi diyakini merupakan pemimpin populis yaitu pemimpin yang peduli pada rakyat kecil.

Kehadiran pemimpin populis di kancah perpolitikan baik nasional maupun internasional memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya adalah pemimpin

populis cenderung memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Pemimpin populis juga akan berusaha menjaga kepentingan nasional negaranya dari intervensi pihak asing. Karenanya tidak mengherankan jika pemimpin populis sering melakukan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Hal tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan dana agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat kecil yang merupakan pengikutnya. Sementara efek negatifnya adalah pemimpin populis berpotensi menjadi pemimpin otoriter, anti imperialisme dan anti pasar. Hal ini pernah terjadi di Venezuela dan Iran. Ketika Hugo Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1998, Chavez menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif dan secara tegas berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Chavez berupaya mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin dan memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang dapat bertindak bebas dari

¹ Otniel Tamindael, "Indonesian president-elect Jokowi gains international recognition," 24 Juli 2014. lihat di <http://www.antaraneews.com/en/news/95009/indonesian-president-elect-jokowi-gains-international-recognition> (diakses 15 November, 2014).

doktrin Washington.² Demikian pula halnya dengan Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Ketika terpilih sebagai presiden Iran pada 2005, Ahmadinejad mencoba menerapkan kebijakan populis yang menjadi *trend* pada era revolusi Iran sehingga gaya politiknya yang konfrontatif, otoriter dan seruanya yang berapi-api menyerukan sikap anti Amerika dan Israel membuat Ahmadinejad dikategorikan sebagai pemimpin kontroversial. Pemerintahannya sangat tegas mempromosikan agenda Pan Islamic dan mencoba memperkuat pengaruh Iran di kawasan. Dalam pemberitaan media Barat, baik Chavez maupun Ahmadinejad dianggap sebagai pemimpin negara berkembang yang ingin menentang kepemimpinan Amerika baik di kawasan maupun pada tatanan global.³

Berkaca dari fakta diatas, artikel ini akan menyoroti arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pihak asing. Apakah

Joko Widodo akan menjalankan sikap yang menentang atau justru kooperatif terhadap pihak asing. Hal ini penting karena arah kebijakan luar negeri Joko Widodo akan menentukan bentuk hubungan yang akan tercipta antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia terutama Amerika Serikat.

Definisi Populisme

Populisme (*populis* dalam bahasa latin) merupakan sebuah istilah yang masih diperdebatkan oleh para pakar ekonomi politik.⁴ Berdasarkan pengalaman negara-negara di benua Amerika Latin, populisme diidentikkan dengan rezim personalistik yang tumbuh subur di era ISI (Industrialisasi Substitusi Import) pada tahun 1940-1960an. Populisme juga sering diartikan sebagai sebuah gerakan, sebuah rezim, seorang pemimpin atau bahkan

² Michael Dodson dan Manochehr Dorraj, "Populism and Foreign Policy in Venezuela, and Iran", *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Winter/Spring 2008, 71.

³ Ibid.

⁴ Allan Knight, "Populism and Neo-populism in Latin America," *Journal of Latin American Studies*, 30, 2 (May 1998)., 22.

sebuah negara yang mengklaim memiliki kedekatan dengan rakyat.⁵

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi populisme, istilah tersebut terus digunakan dan tetap menjadi konsep yang berguna bagi keperluan analisis lebih lanjut. Margaret Canovan mengemukakan satu pola populisme yang sulit diperdebatkan. Menurutnya, populisme di negara berkembang berhubungan erat dengan krisis ekonomi akibat pembangunan yang terlalu lambat⁶ dan hal ini, menurut Paul Taggart, memberi peluang kepada kelompok nasionalis untuk mendorong adanya perubahan terutama dari segala bentuk ketergantungan pada para kolonial.⁷

Allan Knight mendefinisikan populisme sebagai sebuah gaya politik khusus yang memperlihatkan adanya ke-

dekatan hubungan dengan rakyat.⁸

Kenneth M. Roberts menyatakan bahwa populisme merupakan mobilisasi politik massa dari atas ke bawah yang dilakukan oleh pemimpin personalistik untuk menentang sekelompok elit dengan mengatasnamakan penderitaan rakyat (*the top-down political mobilization of mass constituencies by personalistic leaders who challenge elite groups on behalf of an ill-defined pueblo, or "the people"*).⁹

Sedangkan Kurt Weyland berargumen bahwa populisme adalah strategi politik yang digunakan oleh pemimpin populis untuk mencapai kekuasaan dengan melakukan kontak langsung dengan massa yang tidak terorganisir (*a political strategy through which a personalistic leader seeks or exercises government power based on direct, unmediated uninstitutionalized support from large numbers of mostly unorganized followers*).¹⁰ Berdasarkan

definisi Knight, Roberts dan Weyland

⁵ Kurt Weyland, "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics, *Comparative Politics*, 34, 1 (October 2001), 2.

⁶ Margaret Canovan, "Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy," dalam *Democracies and the Populist Challenge*, ed. Y. Meny and Y. Sure (Houndsmills, England: Palgrave, 2002), 25-44.

⁷ Paul Taggart, *Populism* (Philadelphia: Open University Press, 2000), 60.

⁸ Allan Knight, *Op.cit.*, 22.

⁹ Kenneth M. Roberts, "Latin America's Populist Revival", *SAIS Review*, Vol. XXVII No. 1 (Winter-Spring 2007), 5-6.

¹⁰ Weyland, *Op.cit.*, 14.

tersebut nampak jelas bahwa populisme merupakan strategi yang digunakan oleh pemimpin untuk mencapai kekuasaan baik itu sebagai gaya politik maupun sebagai model pergerakan (mobilisasi) massa.

Menurut Roberts, populisme memiliki lima karakteristik utama.¹¹ *Pertama*, pola kepemimpinan populis bersifat personalistik dan paternalistik bahkan terkadang karismatik. *Kedua*, populisme merupakan aliansi politik multikelas dan heterogen yang mana pengikutnya merupakan masyarakat yang terkonsentrasi di daerah pinggiran. *Ketiga*, terjadi mobilisasi politik dari atas ke bawah. *Keempat*, ideologi yang diadopsi oleh pemimpin populis cenderung tidak jelas. *Kelima*, populisme merupakan proyek ekonomi yang menggunakan metode redistributif atau klientilistik untuk menciptakan fondasi materi bagi dukungan rakyat.

¹¹ Roberts M. Kenneth, "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case." *World Politics*. Vol. 48, No. 1 (Oct 1995), 88.

Varian Populisme

Populisme dalam beberapa tahun terakhir menjadi objek perdebatan para pakar ekonomi politik internasional. Populisme dikaitkan dengan adanya pergeseran ke kiri negara-negara di benua Amerika Latin pada penghujung tahun 1990an atau yang lebih dikenal dengan fenomena *Latin America's Turn Left*.

Kiri yang dimaksud adalah bervariasi, mulai dari sosial demokrat, populis kiri hingga komunis. Kiri berarti berpandangan kerakyatan (pro rakyat kecil/populis) dan sosialis. Kiri yang muncul sekarang adalah metamorfose baru yaitu kiri yang antitesa dari neoliberalisme. Paham neoliberalisme (liberalisme baru atau kanan baru) yang muncul pada tahun 1980an dan telah menjadi panutan di hampir semua negara sangat mengedepankan kepentingan pasar, meminggirkan peran negara dan meminggirkan rakyat kecil. Pengalaman di Amerika Latin memperlihatkan bahwa rejim neoliberalisme telah gagal total.

Rejim-rejim neoliberalisme tidak lagi dipercaya rakyat dan rakyat mencari alternatif baru.¹²

Jorge Castaneda dalam artikelnya yang berjudul *Latin America's Turn Left* mengelompokkan kiri di Amerika Latin menjadi dua yaitu kiri moderat (*moderat left*) dan kiri radikal/populis (*left radical*). Yang dimaksud dengan kiri moderat adalah yang modern, terbuka, reformis dan internasionalis. Kelompok kiri ini berupaya melepaskan diri dari ideologi kiri peninggalan Komunis Internasional dan Revolusi Bolshevik di masa lalu dan mampu merekonstruksi diri.¹³ Kebijakan kelompok kiri moderat menekankan pada kebijakan sosial seperti pendidikan, program anti kemiskinan, kesehatan, perumahan. Mereka juga mencoba untuk memperkuat dan memperluas institusi-institusi demokrasi. Mereka tidak terlalu setuju dengan Amerika Serikat tetapi juga tidak bersedia bersikap konfrontatif

terhadap Amerika Serikat. Castaneda memasukkan Ricardo Lagos dan Michele Bachelet dari Chili, Tabare Vasquez dari Uruguay dan Luiz Ingancio De La Silva dari Brazil kedalam kategori pemimpin kiri moderat.¹⁴

Kelompok kiri radikal merupakan kelompok yang memiliki keterkaitan dengan tradisi populisme Amerika Latin. Mereka adalah nasionalis, vokal dan berpikiran tertutup/sempit.¹⁵ Kelompok kiri populis kurang responsif terhadap perubahan. Bagi mereka, retorika lebih penting daripada substansi. Kekuasaan lebih penting daripada melakukan tanggungjawab. Para pengikut mereka yang miskin dan putus asa hanya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan. Mereka kurang perhatian pada perbaikan ekonomi, nilai-nilai demokrasi dan pencapaian program kebijakan. Mereka juga menentang upaya Amerika Serikat mempromosikan kepentingan negaranya di seluruh dunia. Para pemimpin Amerika

¹² Bonnie Setiawan, "Trend 'Kiri' Di Amerika Latin Perlu Dicontoh", *Global Justice UpDate* vol. 5 no. 1 (Jan. 2007), 19.

¹³ Jorge G. Castaneda, "Latin America's Turn Left", *Foreign Affairs*, (May/June 2006), 1.

¹⁴ *Ibid.*, h. 4

¹⁵ *Ibid.*, h. 1.

Latin yang termasuk dalam kelompok ini adalah Fidel Castro dari Cuba, Hugo Chaves dari Venezuela, Evo Morales dari Bolivia, Nestor Krichner dari Argentina dan Lopez Obrador dari Meksiko.¹⁶

Alvaro Vargas Llosa dalam artikelnya yang berjudul *The Return of Idiots* menyebut kiri moderat sebagai kiri herbivora (*herbivores/vegetarian*) dan kiri radikal/populis sebagai kiri karnivora (*carnivores*). Menurut Llosa, pemimpin kiri herbivora telah menghindari kesalahan dari kelompok kiri lama seperti bersikap konfrontatif terhadap negara maju dan IMF. Mereka juga telah berkomitmen untuk menerapkan model sosial demokrat. Para pemimpin yang termasuk dalam kelompok herbivora adalah Lula da Silva dari Brasil, Tabare Vasquez dari Uruguay dan Oscar Arias dari Kostarika.¹⁷ Sebaliknya, kelompok kiri karnivora tetap berpegang teguh pada cara pandang

kelompok marxis terhadap masyarakat dan mentalitas perang dingin yang memisahkan kelompok utara dari kelompok selatan. Mereka mencoba mengeksploitasi ketegangan etnis memperkuat kekuasannya. Pemimpin yang termasuk dalam kelompok kiri karnivora adalah Fidel Castro dari Cuba, Hugo Chavez dari Venezuela, Evo Morales dari Bolivia dan Rafael Correa dari Ekuador.¹⁸

Baik pemimpin kelompok kiri radikal maupun kelompok kiri moderat, keduanya mengklaim bahwa mereka adalah pemimpin populis dan memiliki kedekatan dengan rakyat. Mereka berjanji bahwa mereka akan berjuang bagi kesejahteraan rakyat kecil dan akan mengeluarkan mereka dari penderitaan. Terkait dengan situasi politik di Indonesia, kehadiran pemimpin populis pun menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Pasaunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan pemimpin sebelumnya dinilai terlalu sibuk

¹⁶ Ibid., h. 5.

¹⁷ Alvaro Vargas. Llosa "The Return of Idiots".18 April 2007. lihat di http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/04/18/the_return_of_the_idiot (diakses 15 November 2014).

¹⁸ Ibid.

membangun citra dan menjadi jauh dengan rakyat. Kredibilitas SBY semakin merosot ketika terbukti banyak pejabat di pemerintahannya yang tersangkut dengan kasus korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan apatisme dalam diri masyarakat terhadap kepemimpinan SBY termasuk terhadap partainya yaitu Partai Demokrat.

Munculnya Jokowi sebagai pemimpin yang peduli dengan masyarakat khususnya masyarakat kecil dan kegemarannya melakukan *blusukan* ke tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat telah memberikan warna baru dalam wajah kepemimpinan politik Indonesia. Jokowi dinilai sebagai pemimpin populis dan dianggap mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan penggolongan yang dilakukan oleh Castaneda dan Llosa terhadap para pemimpin kiri Amerika Latin maka artikel ini akan

mengelompokkan pemimpin populis menjadi dua yaitu populis radikal dan populis moderat. Populis radikal terdiri dari para pemimpin kiri radikal/populis dan kiri karnivora. Sedangkan populis moderat terdiri dari pemimpin kiri moderat dan kiri herbivora/vegetarian. Artikel ini mengkategorikan Jokowi sebagai pemimpin populis moderat atau populis herbivora/vegetarian. Adapun karakteristik populis yang dimiliki oleh Jokowi adalah sebagai berikut:

1. Menghargai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Bersikap ramah dan mau bekerjasama dengan pihak asing termasuk Amerika Serikat;
3. Menentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia;

4. Memberikan subsidi secara hati-hati kepada masyarakat miskin;
5. Memprioritaskan terciptanya lapangan kerja bagi seluruh masyarakat terutama di daerah-daerah tertinggal.

Situasi Krisis di Indonesia

Seperti yang dikemukakan oleh Margareth Canovan, populisme di negara berkembang umumnya muncul karena ada krisis. Hal yang sama berlaku pula di Indonesia. Kehadiran Jokowi di panggung perpolitikan nasional dipicu oleh krisis. Paling tidak ada empat masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini yaitu korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran.

Belakangan ini, masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik karena banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. SBY sebagai presiden yang sebelumnya diharapkan mampu membawa

gerbong reformasi menuju perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kemunduran popularitas karena di era kepemimpinannya sarat dengan kasus korupsi. Laporan dari *Indonesia Police Watch* (IPW) menyebutkan para menteri yang banyak terlibat kasus korupsi adalah di era pemerintahan Presiden SBY.¹⁹ Hal itu disampaikan Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Kementerian yang rawan terdoda korupsi adalah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Olahraga, dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Menurut Pane, menteri-menteri dari partai politik (parpol) memiliki beban untuk membantu keuangan parpol. Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali terjerat kasus korupsi karena terbeban untuk mengumpulkan dana yang biasanya

¹⁹ "Menteri Era SBY Banyak Terlibat Kasus Korupsi". 28 Oktober 2014. lihat di <http://www.beritaasatu.com/politik/menteri-era-sby-banyak-terlibat-kasus-korupsi>(diakses 15 November, 2014).

digunakan untuk biaya operasional partai, terutama pada saat pemilihan umum.²⁰

Masalah kedua yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia adalah penurunan kemiskinan yang melambat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia selama 10 tahun terakhir yaitu rata-rata 5,9% pertahun telah membantu menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan turun ke 11.3% pada tahun 2014, dibandingkan 24% pada tahun 1999. Tapi kemudian kecepatannya berkurang. Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0.7% dalam dua tahun terakhir adalah yang terkecil sepanjang satu dekade terakhir. Menurut laporan *World Bank*, sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin yaitu tidak jauh dari batas Rp 11.000 perhari. Guncangan ekonomi seperti jatuh

sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.²¹

Masalah ketiga adalah meningkatnya ketimpangan. Pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah tidak meningkat sedangkan orang kaya semakin bertambah kaya. Menurut laporan *World Bank*, 10% rumah tangga terkaya di Indonesia memiliki tingkat konsumsi lebih tinggi dibandingkan 10% rumah tangga termiskin pada 2013. Ekonom utama *World Bank*, Ndiame Diop mengatakan bahwa kesenjangan kelompok kaya dan kelompok miskin di Indonesia semakin melebar. Kesenjangan tersebut melebar dibandingkan sepuluh tahun lalu. Konsumsi pada sebanyak 10% rumah tangga kaya 6,6 kali lipat dibanding 10% rumah tangga termiskin. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena peningkatan

²⁰ “Belajar dari Kasus Korupsi pada Era SBY, Jokowi Diminta Tak Pilih Menteri dari Parpol”. 4 September 2014. lihat di <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/1442110/Belajar.dari.Kasus.Korupsi.pada.Era.SBY.Jokowi.Diminta.Tak.Pilih.Menteri.dari.Parpol>. (diakses 15 November, 2014).

²¹ “Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat: World Bank.” 22 September 2014. lihat di <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports>(diakses 15 November, 2014).

ketimpangan mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang baik. Seharusnya masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Menurut Diop, peningkatan ketimpangan sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial masyarakat.²² Selain itu, kesenjangan antar daerah juga masih tetap ada. Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo masih tertinggal dari wilayah lain terutama Jawa. Akibatnya, meski upaya mengurangi kemiskinan mengalami kemajuan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur.²³

Masalah keempat adalah meningkatnya Pengangguran.

²² “World Bank: Konsumsi Orang Kaya 10 Kali Lebih Tinggi Dibanding Si Miskin”. 21 Juli 2014. lihat di <http://www.gatra.com/ekonomi-1/57358-world-bank-konsumsi-orang-kaya-10-kali-lebih-tinggi-dibanding-si-miskin%E2%80%8F.html>(diakses 15 November, 2014).

²³ “Poverty Reduction in Indonesia Slows, Inequality Increases: World Bank reports”. 22 September, 2014. <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports>. (diakses 15 November, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai setelah satu dekade ternyata belum dapat membantu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Diperkirakan 55-65 % penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. 80% pekerjaan informal ini terdapat di daerah pedesaan khususnya di sektor konstruksi dan pertanian. Bank Dunia memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar 2 juta masyarakat Indonesia akan memasuki dunia kerja. Untuk itu pemerintah harus mencari lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja muda tersebut.²⁴

Jokowi Menawarkan Alternatif

Jokowi merupakan orang yang berasal dari masyarakat biasa, bukan konglomerat, bukan keturunan bangsawan, bukan Mantan Jenderal dan bukan Ketua Umum Partai Politik. Jokowi adalah seorang pengusaha furniture yang terpilih

²⁴ “New Poverty Frontier in Indonesia: Reduction Slows, Inequality Rises”. 23 September, 2014. <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/09/23/new-poverty-frontier-in-indonesia-reduction-slows-inequality-rises>. (diakses 15 November, 2014).

sebagai walikota Solo pada 2005 dan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2014. Selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi banyak melakukan dialog dengan pedagang, nelayan, petani di pasar, tempat pelelangan ikan, dan desa. Melalui dialog-dialog tersebut, Jokowi mengetahui masalah-masalah krusial yang saat ini dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, Jokowi menawarkan alternatif kepada pemerintah dan bangsa Indonesia.

Paling tidak ada dua hal yang ingin diperbaiki oleh Jokowi. *Pertama*, mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). *Kedua*, menghadirkan kembali negara/pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dalam debat capres pertama pada 9 Juni 2014, Jokowi menjelaskan untuk membangun pemerintah yang bersih, ada dua hal yang dibutuhkan. *Pertama*, pembangunan sistem seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, pajak *online*, dan IMB *online*. Cara-cara

ini yang dibutuhkan dan harus dinasionalisasikan. *Kedua*, perbaikan pola rekrutmen. Dengan menerapkan pola rekrutmen yang benar dan adil maka dapat meminimalisir munculnya pemerintahan yang korup dan menyengsarakan rakyat serta memutus mata rantai KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dengan pola rekrutmen yang benar dan seleksi terbuka maka yang menjadi pimpinan di kementerian bukan berdasarkan pada kedekatan atau senang dan tidak senang.²⁵

Selain mengedepankan terwujudnya pemerintahan bersih, Jokowi juga menawarkan diri sebagai pemimpin yang siap melayani masyarakat. Hal ini terbukti dari kegemarannya melakukan *blusukan* ke tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan masyarakat, berdialog dan mencari solusi bagi masyarakat. Kegiatan ini telah dilakukan oleh Jokowi sejak terpilih sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

²⁵ “Ini Cara Jokowi Bentuk Pemerintahan yang Bersih Jika Jadi R1”. 9 Juni, 2014. <http://www.gatra.com/pemilu-capres/54445-ini-cara-jokowi-bentuk-pemerintahan-yang-bersih-jika-jadi-r1.html>. (diakses 15 November, 2014).

Jokowi banyak melakukan dialog dengan pedagang, nelayan, petani di pasar, tempat pelelangan ikan, dan desa. Dengan cara dialog, Jokowi banyak menyelesaikan konflik untuk kepentingan rakyat. Bidang yang selalu menjadi keluhan masyarakat Indonesia saat ini adalah pendidikan dan kesehatan. Karenanya, Jokowi mempromosikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sehat (KIS). Tujuannya adalah agar anak-anak miskin Indonesia bisa sekolah dan keluarga miskin tetap sehat. Sasaran program KIP adalah anak-anak yang kurang mampu dalam pembiayaan sekolah. Mereka akan mendapatkan bantuan biaya dari mulai tingkat SD hingga SMA/SMK baik di sekolah negeri atau swasta. Selain wajib belajar 12 tahun, Jokowi juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswi yang tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang kesarjanaan. Jokowi juga akan meningkatkan program magang kerja bagi siswa-siswi serta mahasiswa agar

mereka memiliki ketrampilan praktis yang lebih baik.²⁶

Arah Kebijakan Luar Negeri Jokowi

J.N. Rossenau dalam bukunya yang berjudul *International Politics dan Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* mendefinisikan kebijakan luar negeri (*foreign Policy*) sebagai semua sikap dan aktivitas yang ditempuh oleh negara/pemerintah dalam upaya menguasai dan mendapatkan manfaat dari lingkungan internasional (*all attitudes and activities through which organized nation societies seeks to cope and benefit from international environment*).²⁷ Dari definisi tersebut, Jokowi sebagai pemimpin baru Indonesia harus menentukan sikap dan pandangannya terhadap dunia internasional dan berupaya memperoleh manfaat dari lingkungan internasional

²⁶ “Jokowi Perkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar di Medan”. 10 Juni, 2014. <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2061274/jokowi-perkenalkan-kartu-indonesia-sehat-dan-pintar-di-medan>. (diakses 4 November, 2014).

²⁷ J. N. Rossenau, *International Politics dan Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (New York: Macmillan Publishing Co.Inc.,1979), 27.

tersebut dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia. Sikap dan pandangan Jokowi sangat menentukan posisi dan nilai tawar Indonesia. Dari sikap dan pandangan Jokowi tersebut, pola hubungan yang akan terbentuk antara Indonesia dengan negara-negara lain dapat terbaca.

Di era persaingan global, pihak asing cenderung mengendalikan negara dengan cara halus. Pihak asing sangat mudah menancapkan pengaruhnya terhadap pemimpin yang hanya mengedepankan kepentingan bisnis pribadi. Di era sekarang, pihak asing lebih menghormati presiden visioner. Sikap keras hanya bikin antipati. Dilihat dari debat capres ketiga pada 22 Juni 2014, sikap dan pandangan Jokowi terhadap asing dinilai lebih berkarakter, terbuka namun tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Jokowi, dalam visi misinya bertekad mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Ada empat prioritas yang dikedepankan oleh Jokowi. *Pertama*, perlindungan Warga Negara Indonesia terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Kedua*, perlindungan sumber daya maritim dan perdagangan. *Ketiga*, produktivitas dan daya saing. *Keempat*, menjaga keamanan regional kawasan. Untuk mencapai keempat hal tersebut, strategi yang dikembangkan oleh Jokowi adalah bersikap kooperatif terhadap pasar dan pihak asing serta mengedepankan diplomasi.

Didepan ratusan pengusaha APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Jokowi berjanji mempercepat semua proses perizinan usaha. Salah satunya dengan memperbaiki layanan satu pintu dan mempercepat prosesnya. Proses perizinan investasi dan penanaman modal akan disatukan di satu badan. Selama ini untuk mengurus perizinan investasi atau penanaman modal dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Banyaknya aturan di

pusat dan daerah seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota membuat pengusaha baik lokal maupun asing mengeluh.

Dengan memangkas hambatan investasi, Jokowi bermaksud mengurangi subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Menurut anggaran belanja negara 2015, subsidi bahan bakar akan meningkat hingga Rp 44.6 trilyun (US\$3.72 milyar) dan menjadi Rp 291.1 trilyun pada tahun berikutnya. Jokowi tidak memiliki pilihan selain harus menaikkan bahan bakar. Dengan begitu, Jokowi memiliki anggaran untuk merelokasinya ke sektor-sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur dan pertanian.²⁸ Jokowi berencana akan mmebangun 1.250 mil

jalan raya, 10 lapangan terbang baru dan 10 pelabuhan baru.²⁹

Selain ramah terhadap investor baru, Jokowi juga memperlihatkan sikap kooperatifnya terhadap perusahaan-perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia. Jokowi menyatakan akan menghormati kontrak yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan perusahaan-perusahaan asing. Hal ini merupakan suatu upaya pembangunan kepercayaan terhadap investor. Tetapi jika kontrak tersebut telah berakhir, pemerintah dapat mengadakan kalkulasi ulang. Untuk menarik lebih banyak investasi yang mendongkrak produksi domestik, Jokowi akan mengeluarkan aturan yang lebih *flexible* dalam pengelolaan minyak dan gas.³⁰

Dalam debat capres ketiga, 22 Juni 2014, Jokowi menjelaskan akan pentingnya mengedepankan diplomasi dalam

²⁸ "Jokowi promises to make RI better place for investors". 20 September, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/20/jokowi-promises-make-ri-better-place-investors.html>(diakses 15 November, 2014).

²⁹ Hiebert, Murray. "A Bucket of Challenges Awaits Presidential Victor in Indonesia". 27 Juni 2014. http://www.aseanaffairs.com/asean_analysis_27_june_2014/a_bucket_of_challenges_awaits_presidential_victor_in_indonesia. (diakses 15 November, 2014).

³⁰ Ibid.

rangka mencapai kepentingan nasional. Menurut Jokowi, segala sesuatu bisa dicapai dengan dialog dan diplomasi; segala persoalan bisa diselesaikan melalui diplomasi. Diplomasi dapat dilakukan melalui antar pemerintah, antar pengusaha dan antar masyarakat. Dengan begitu, Jokowi mengharapkan Indonesia dapat hidup berdampingan dengan baik dengan negara-negara lain didunia. Meskipun Jokowi lebih memilih bersikap kooperatif terhadap pihak asing, Jokowi memiliki ambisi untuk membangkitkan kembali prestise nasional Indonesia. Jokowi menyatakan akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ambisi ini masuk akal mengingat posisi strategis Indonesia yang tepat berada diantara samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.³¹

Ambisi Jokowi ini akan terwujud jika Jokowi berhasil meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai lebih dari 7% pertahun. Dengan meningkatnya perekonomian, akan tersedia dana untuk membiayai pertahanan dan keamanan negara. Jokowi memiliki rencana untuk memperkuat tentara Indonesia, memodernisasi alat-alat pertahanan termasuk pertahananan *cyber* dan *hybrid* dan memodernisasi industri pertahanan. Dengan begitu, Jokowi akan mampu memenangkan kompetisi dan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang berwibawa dan dihormati oleh negara-negara lain di dunia.

Respon Masyarakat Internasional Terhadap Jokowi

Terpilihnya Jokowi sebagai pemimpin baru Indonesia yang memiliki gaya kepemimpinan populis ternyata mendapat respon positif dari masyarakat internasional. Setelah KPK (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan hasil perhitungan suara dan menetapkan Jokowi

³¹ "Pengamat: Jokowi Telah Lahirkan Doktrin Baru Politik Luar Negeri Indonesia". 24 Juni 2014. <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/24/pengamat-jokowi-telah-lahirkan-doktrin-baru-politik-luar-negeri-indonesia014>(diakses 15 November, 2014).

sebagai presiden terpilih, para pemimpin dunia menunjukkan dukungannya.

Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama menyatakan dukungan kepada Jokowi dan berjanji akan berbicara dengan Jokowi pada pertemuan APEC di China pada November 2014. AS melihat rakyat Indonesia telah memperlihatkan komitmen terhadap proses demokrasi melalui pemilu yang bebas dan adil. Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, AS dan Indonesia telah memberikan contoh kepada dunia. Menurut Obama, Indonesia dan AS memiliki banyak persamaan nilai, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum. Kedua bangsa telah bekerja keras untuk membangun Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, yang telah memperkuat hubungan bilateral sehingga bisa menghadapi tantangan bersama baik dalam tataran regional maupun global. Untuk itu, AS akan meningkatkan kemitraannya dengan Indonesia demi memajukan cita-cita global

bersama, serta mengembangkan hubungan antar masyarakat kedua negara.³²

Selain dari Barrack Obama, dukungan terhadap Jokowi juga datang dari Australia. Perdana Menteri Australia, Tony Abbot. Dimata Australia, Indonesia merupakan negara besar dengan populasi warga muslim terbanyak yang berhasil menjalankan demokrasi dengan baik. Australia berharap Indonesia akan muncul sebagai negara adidaya di Asia dan kebijakan luar negeri Australia akan selalu membutuhkan Indonesia.³³

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mendukung Jokowi dan berharap Jepang dan Indonesia akan lebih memperkuat kerjasama strategisnya demi terwujudnya keamanan, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Keinginan untuk memperkuat kerjasama dengan

³² "John Kerry: Rakyat Indonesia Telah Tunjukkan Komitmen terhadap Proses Demokrasi." 23 Juli 2014. <http://www.beritasatu.com/pemilu2014-aktualitas/198643-john-kerry-rakyat-indonesia-telah-tunjukkan-komitmen-terhadap-proses-demokrasi.html>. (diakses 15 November, 2014).

³³ "PM Abbott: Pelantikan Jokowi Penting bagi Australia". 20 Oktober, 2014 <http://news.liputan6.com/read/2121597/pm-abbott-pelantikan-jokowi-penting-bagi-australia>. (diakses 15 November, 2014).

Indonesia juga disampaikan oleh President Komisi Eropa, José Manuel Durão Barroso. Uni Eropa sangat menghargai partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum dan berharap dapat bekerjasama lebih erat lagi di masa depan.³⁴

Menteri Industri dan Perdagangan Rusia, Genghis Manturov mewakili Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan dukungannya terhadap Jokowi. Putin sangat ingin bertemu dengan Jokowi guna membahas sejumlah agenda penting tentang kerjasama bilateral kedua negara.³⁵ Dukungan dari Malaysia pun muncul untuk Jokowi. Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak berkomitmen untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia yang selama ini kurang bersahabat karena baik Indonesia maupun

Malaysia amat memahami pentingnya hubungan Malaysia- Indonesia.³⁶

Kesimpulan

Jokowi sebagai pemimpin populis baru Indonesia memiliki gaya yang sangat berbeda dengan Chavez dan Ahmadinejad. Artikel ini mengkategorikan Jokowi sebagai pemimpin populis moderat. Data-data yang disajikan dalam artikel memperlihatkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang demokratis, ramah terhadap investor dan pihak asing serta mengedepankan diplomasi sebagai alat mencapai kepentingan nasional. Sikap Jokowi ini menyebabkan masyarakat Internasional khususnya Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa merespon positif kehadiran Jokowi.

Meskipun demikian, Jokowi juga menyampaikan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini dimungkinkan mengingat posisi strategis Indonesia yang terletak

³⁴ “World leaders ‘slow’ in congratulating Jokowi”. 24 Juli 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/24/world-leaders-slow-congratulating-jokowi.html>. (diakses 15 November, 2014).

³⁵ “Rusia Ingin Jokowi Segera Temui Vladimir Putin.” 21 Oktober 2014. <http://www.pemilu.com/berita/2014/10/rusia-ingin-jokowi-segera-temui-vladimir-putin/>.(diakses 15 November, 2014).

³⁶ Ibid.

diantara dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Apabila Jokowi benar-benar ingin mewujudkan ambisinya tersebut maka Jokowi harus memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan begitu, akan tersedia anggaran untuk membiayai pertahanan dan keamanan negara. Doktrin Jokowi tidak akan bermakna bagi dunia dan masyarakat internasional bahkan masyarakat Indonesia bila Jokowi tidak dapat menerjemahkannya dalam sejumlah kegiatan dalam bentuk konkrit. Oleh sebab itu, Jokowi memerlukan para menteri, pejabat pemerintahan baik di pusat dan daerah untuk menjabarkan doktrin Jokowi tersebut dalam berbagai program.

Daftar Pustaka

- Canovan, Margaret. "Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy," dalam Y. Meny and Y. Sure (ed.), *Democracies and the Populist Challenge*, Houndsmills, England: Palgrave, 2002.
- Castaneda, Jorge G. "Latin America's Turn Left", *Foreign Affairs*, May/June, 2006.
- Dodson, Michael & Dorraj, Manochehr, "Populism and Foreign Policy in Venezuela, and Iran", *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Winter/Spring, 2008.
- Knight, Alan. "Populism and Neopopulism in Latin America," *Journal of Latin American Studies*, 30, 2 (May), 1998.
- Roberts, Kenneth M. "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case." *World Politics*. Vol. 48, No. 1 (Oct), 1995.
- _____, "Latin America's Populist Revival", *SAIS Review*, Vol. XXVII No. 1 (Winter-Spring), 2007.
- Rossenau. J. N. *International Politics dan Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: Macmillan Publishing Co.Inc, 1979.
- Setiawan, Bonnie. "Trend 'Kiri' Di Amerika Latin Perlu Dicontoh." *Global Justice UpDate* vol. 5 no. 1 (Jan), 2007.
- Taggart, Paul. *Populism*. Philadelphia: Open University Press, 2000.
- Weyland, Kurt. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics," *Comparative Politics*, 34, 1 (October), 2001.

Internet

- Hiebert, Murray. "A Bucket of Challenges Awaits Presidential Victor in Indonesia". 27 Juni 2014. http://www.aseanaffairs.com/asean_analysis_27_june_2014/a_bucket_of_challenges_awaits_presidential_victor_in_indonesia. (diakses 15 November, 2014).
- Llosa, Alvaro Vargas. "The Return of Idiots". 18 April 2007. lihat di http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/04/18/the_return_of_the_i

- diot (diakses pada 15 November 2014).
- Tamindael , Otniel, “Indonesian president-elect Jokowi gains international recognition,”.24 Juli 2014. lihat di <http://www.antaraneews.com/en/news/95009/indonesian-president-elect-jokowi-gains-international-recognition> (diakses 15 November, 2014).
- “Belajar dari Kasus Korupsi pada Era SBY, Jokowi Diminta Tak Pilih Menteri dari Parpol”. 4 September 2014. lihat di <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/1442110/Belajar.dari.Kasus.Korupsi.pada.Era.SBY.Jokowi.Diminta.Tak.Pilih.Menteri.dari.Parpol>. (diakses 15 November, 2014).
- “Ini Cara Jokowi Bentuk Pemerintahan yang Bersih Jika Jadi R1”. 9 Juni, 2014. <http://www.gatra.com/pemilu-capres/54445-ini-cara-jokowi-bentuk-pemerintahan-yang-bersih-jika-jadi-r1.html>. (diakses 15 November, 2014).
- “John Kerry: Rakyat Indonesia Telah Tunjukkan Komitmen terhadap Proses Demokrasi.” 23 Juli 2014. <http://www.beritasatu.com/pemilu2014-aktualitas/198643-john-kerry-rakyat-indonesia-telah-tunjukkan-komitmen-terhadap-proses-demokrasi.html>. (diakses 15 November, 2014).
- “Jokowi Perkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar di Medan”. 10 Juni, 2014. <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2061274/jokowi-perkenalkan-kartu-indonesia-sehat-dan-pintar-di-medan>. (diakses 4 November, 2014).
- “Jokowi promises to make RI better place for investors”. 20 September, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/20/jokowi-promises-make-ri-better-place-investors.html>(diakses 15 November, 2014).
- “Menteri Era SBY Banyak Terlibat Kasus Korupsi”. 28 Oktober 2014. lihat di <http://www.beritaasatu.com/politik/menteri-era-sby-banyak-terlibat-kasus-korupsi>(diakses 15 November, 2014).
- “New Poverty Frontier in Indonesia: Reduction Slows, Inequality Rises”. 23 September, 2014.<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/09/23/new-poverty-frontier-in-indonesia-reduction-slows-inequality-rises>. (diakses 15 November, 2014).
- “Pengamat: Jokowi Telah Lahirkan Doktrin Baru Politik Luar Negeri Indonesia”. 24 Juni 2014. <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/24/pengamat-jokowi-telah-lahirkan-doktrin-baru-politik-luar-negeri-indonesia014>(diakses 15 November, 2014).
- “Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat: World Bank.” 22 September 2014. lihat di <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty->

reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports(diakses 15 November, 2014).

“PM Abbott: Pelantikan Jokowi Penting bagi Australia”. 20 Oktober, 2014 <http://news.liputan6.com/read/2121597/pm-abbott-pelantikan-jokowi-penting-bagi-australia>. (diakses 15 November, 2014).

“Poverty Reduction in Indonesia Slows, Inequality Increases: World Bank reports”. 22 September, 2014. <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports>. (diakses 15 November, 2014).

“World Bank: Konsumsi Orang Kaya 10 Kali Lebih Tinggi Dibanding Si Miskin”. 21 Juli 2014. lihat di <http://www.gatra.com/ekonomi-1/57358-world-bank-konsumsi-orang-kaya-10-kali-lebih-tinggi-dibanding-si-miskin%E2%80%8F.html>(diakses 15 November, 2014).

“World leaders ‘slow’ in congratulating Jokowi”. 24 Juli 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/24/world-leaders-slow-congratulating-jokowi.html>. (diakses 15 November, 2014).

“Rusia Ingin Jokowi Segera Temui Vladimir Putin.” 21 Oktober 2014. <http://www.pemilu.com/berita/2014/10/rusia-ingin-jokowi-segera-temui-vladimir-putin/>.(diakses 15 November, 2014).